

# Manajemen Pembiayaan dalam Peningkatan dan Pengembangan Peserta Didik

Romlatul Wahidah<sup>1\*</sup>, Abdul Aziz<sup>2</sup>



<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Madura, Jawa Timur, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Madura, Jawa Timur, Indonesia

\*Corresponding: [romlatulwahidah@gmail.com](mailto:romlatulwahidah@gmail.com)

## ARTICLE INFO

### Article history:

Diterima 7 September 2025

Direvisi 10 September 2025

Diterima 25 September 2025

Tersedia online 1 Oktober 2025

### Kata Kunci:

Manajemen Pembiayaan,  
peningkatan dan Pengembangan  
Peserta Didik.

### Keywords:

Management Financing,  
Improvement and Development,  
Student.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Garut.

## ABSTRAK

Efektivitas manajemen pembiayaan pada satuan pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan program peningkatan dan pengembangan peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan ruang lingkup strategis pembiayaan pendidikan sebagai pendorong utama dalam mendukung pertumbuhan peserta didik secara holistik. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi literatur, kajian ini mengeksplorasi bagaimana perencanaan keuangan, alokasi dana, dan mekanisme akuntabilitas yang dikelola secara optimal dapat mendorong peningkatan prestasi akademik, pengembangan bakat, dan pembentukan karakter peserta didik. Temuan menunjukkan bahwa satuan pendidikan menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya keuangan, rendahnya kapasitas manajerial, serta kurangnya keterlibatan pemangku kepentingan. Namun demikian, manajemen pembiayaan yang strategis yang ditandai dengan transparansi, perencanaan partisipatif, dan penganggaran berbasis kinerja, dinilai efektif dalam menyelaraskan sumber daya finansial dengan pencapaian tujuan pendidikan yang berorientasi pada peserta didik. Artikel ini memberikan wawasan dalam memperkuat tata kelola pembiayaan sebagai bagian integral dari manajemen mutu pendidikan.

## ABSTRACT

The effectiveness of financing management in educational institutions has a significant impact on the success of programs aimed at improving and developing students. This study aims to analyze the concept and strategic scope of educational financing as a key driver in supporting students' holistic growth. Using a qualitative descriptive approach through a literature study, this research explores how financial planning, fund allocation, and accountability mechanisms that are optimally managed can foster academic achievement, talent development, and character building among students. The findings indicate that educational institutions face challenges such as limited financial resources, low managerial capacity, and a lack of stakeholder involvement. Nevertheless, strategic financing management characterized by transparency, participatory planning, and performance-based budgeting is considered effective in aligning financial resources with the achievement of student-oriented educational goals. This article provides insights into strengthening financing governance as an integral part of education quality management.

## 1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang sangat menentukan kualitas sumber daya manusia dalam suatu bangsa. Dalam upaya mencetak generasi yang unggul, peningkatan dan pengembangan peserta didik menjadi salah satu fokus utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan dukungan yang kuat dalam berbagai aspek, salah satunya adalah manajemen pembiayaan yang efektif dan efisien.

Manajemen pembiayaan pendidikan merupakan bagian penting dari keseluruhan manajemen pendidikan. Ia mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap seluruh proses pembiayaan yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pendidikan, termasuk pengembangan potensi peserta didik secara optimal. Tanpa dukungan dana yang cukup dan dikelola secara baik, pengembangan peserta didik baik dari aspek akademik, kepribadian, maupun keterampilan, akan sulit untuk diwujudkan. Soetjipto & Kosasi mengemukakan bahwa pembiayaan pendidikan sangat penting

\*Corresponding author

E-mail addresses: [romlatulwahidah@gmail.com](mailto:romlatulwahidah@gmail.com) (Romlatul Wahidah)

karena merupakan salah satu faktor penunjang dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, serta berpengaruh terhadap keberhasilan proses belajar mengajar (Soetjipto & Kosasi 2004).

Pengembangan peserta didik bukan hanya berbicara tentang pencapaian akademik, tetapi juga menyangkut pembentukan karakter, penguatan keterampilan abad 21, dan peningkatan daya saing di era global. Hal ini menuntut tersedianya program-program pengembangan diri, kegiatan ekstrakurikuler, pelatihan kepemimpinan, pembinaan minat dan bakat, serta layanan bimbingan dan konseling yang memadai. Seluruh kegiatan tersebut memerlukan dukungan pembiayaan yang terencana dan terstruktur. Mulyasa berpendapat bahwa pengembangan peserta didik menuntut adanya dukungan sarana, prasarana, dan pembiayaan yang memadai agar potensi peserta didik dapat berkembang secara maksimal (E. Mulyasa 2011).

Sayangnya, dalam praktiknya masih banyak satuan pendidikan yang belum menerapkan manajemen pembiayaan secara profesional. Hal ini menyebabkan kurang optimalnya program-program peningkatan dan pengembangan peserta didik, karena tidak ada prioritas penggunaan dana atau tidak adanya sistem perencanaan berbasis kebutuhan nyata peserta didik. Beberapa sekolah bahkan masih berfokus pada pembiayaan operasional rutin, tanpa menyisihkan anggaran untuk kegiatan pembinaan dan pengembangan diri siswa. Sering kali pengelolaan keuangan di sekolah hanya bersifat administratif, belum menyentuh aspek strategis yang mampu mendorong peningkatan mutu pendidikan (Sagala 2010).

Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman yang mendalam mengenai konsep dan implementasi manajemen pembiayaan yang diarahkan khusus untuk peningkatan dan pengembangan peserta didik. Dengan pengelolaan pembiayaan yang tepat, sekolah dapat merancang program-program pengembangan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga membentuk peserta didik yang berkarakter, mandiri, dan siap bersaing di era global. Pendidikan yang baik memerlukan perencanaan pembiayaan yang matang, pengendalian yang ketat, serta evaluasi berkelanjutan agar dana yang tersedia benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas peserta didik (E. Mulyasa 2011).

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggambarkan secara mendalam fenomena manajemen pembiayaan dalam peningkatan dan pengembangan peserta didik, tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel penelitian. Penelitian kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk mengkaji realitas sosial secara naturalistik, dengan fokus pada makna, proses, dan konteks yang melingkupi pengelolaan keuangan pendidikan. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) yang bersumber dari jurnal, buku, dokumen resmi, dan regulasi pendidikan terkait pembiayaan. Selanjutnya, data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yaitu menafsirkan makna dari teks dan dokumen secara sistematis untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai strategi pembiayaan pendidikan. Metode ini sejalan dengan pandangan Lexy J. Moleong yang menegaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong 2017). Selain itu, Sugiyono juga menekankan bahwa penelitian deskriptif kualitatif sangat efektif digunakan untuk mengkaji konsep dan praktik manajemen pendidikan karena mampu menghadirkan data yang mendalam, bermakna, serta tidak terlepas dari konteks sosial dan kelembagaan tempat fenomena itu berlangsung (Sugiyono 2019). Dengan demikian, metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini menitikberatkan pada analisis literatur untuk menemukan keterkaitan antara konsep manajemen pembiayaan, strategi implementasi, serta dampaknya terhadap mutu pendidikan dan pengembangan peserta didik.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengertian, Ruang Lingkup Manajemen Pembiayaan dalam Pendidikan, dan Sumber Pembiayaannya

#### 1. Pengertian Manajemen Pembiayaan dalam Pendidikan

Manajemen pembiayaan pendidikan adalah suatu rangkaian proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, serta evaluasi terhadap penggunaan dana pendidikan, yang bertujuan untuk secara optimal mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Proses ini mencakup seluruh aspek pengelolaan keuangan, mulai dari pencarian sumber dana, penyusunan anggaran, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana, yang semuanya dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Menurut Soetjipto dan Kosasi manajemen pembiayaan pendidikan adalah keseluruhan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap kegiatan pembelanjaan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien (Soetjipto

& Kosasi 2004). Sementara itu, menurut E. Mulyasa manajemen pembiayaan merupakan upaya sistematis dalam mengelola dana pendidikan agar dapat mendukung semua program sekolah, khususnya dalam meningkatkan mutu proses dan hasil belajar peserta didik (E. Mulyasa 2011a).

Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen pembiayaan bukan hanya soal mengatur keuangan, tetapi juga merupakan instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan, terutama dalam pengembangan peserta didik secara menyeluruh.

Manajemen pembiayaan dalam pendidikan merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis, mencakup tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap seluruh aktivitas keuangan yang digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Pembiayaan ini meliputi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana, pengadaan tenaga pendidik dan kependidikan, pengembangan kurikulum, serta pelaksanaan program peningkatan mutu peserta didik secara berkelanjutan.

Menurut Fattah, manajemen pembiayaan pendidikan adalah serangkaian aktivitas yang mencakup perencanaan, penggalan, pengalokasian, pemanfaatan, dan pertanggungjawaban dana pendidikan secara efisien dan efektif dalam rangka mendukung proses pendidikan (Nanang 2000). Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa manajemen pembiayaan pendidikan tidak semata-mata berkaitan dengan aspek administratif keuangan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan secara menyeluruh, termasuk dalam pengembangan potensi peserta didik.

## 2. Ruang Lingkup Manajemen Pembiayaan dalam Pendidikan

Manajemen pembiayaan dalam pendidikan tidak hanya berkaitan dengan pencarian dan pengeluaran dana, melainkan mencakup seluruh proses sistematis untuk merencanakan, mengelola, mengendalikan, dan mengevaluasi keuangan agar penyelenggaraan pendidikan berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. Ruang lingkup manajemen pembiayaan ini menyentuh enam aspek utama berikut:

### a. Perencanaan Pembiayaan Pendidikan

Perencanaan pembiayaan adalah tahapan awal yang sangat krusial, di mana lembaga pendidikan menyusun proyeksi kebutuhan dana berdasarkan tujuan dan program yang akan dilaksanakan. Perencanaan yang matang membantu sekolah atau institusi pendidikan menetapkan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan nyata peserta didik dan kurikulum yang diterapkan. Perencanaan pembiayaan merupakan tahap awal yang menentukan arah pengelolaan dana, yang harus dilakukan secara rasional, sistematis, dan sesuai dengan visi pendidikan (Nanang 2000).

### b. Penyusunan dan Penganggaran Dana

Setelah kebutuhan direncanakan, langkah berikutnya adalah menyusun anggaran secara rinci dan proporsional. Penganggaran ini menjadi dasar dalam pembelanjaan keuangan agar tidak melampaui batas kemampuan lembaga dan tetap mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Anggaran merupakan dokumen rencana keuangan tahunan yang berfungsi sebagai alat perencanaan sekaligus sebagai alat pengendalian keuangan di lembaga pendidikan (Hadari 2003).

### c. Pengadaan dan Pengumpulan Sumber Dana

Ruang lingkup ini berkaitan dengan upaya memperoleh dana dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal. Sumber internal dapat berasal dari peserta didik (iuran), sementara eksternal meliputi dana BOS, APBD/APBN, donasi masyarakat, kerja sama dengan pihak ketiga, atau hibah lembaga donor. Keberagaman sumber dana pendidikan penting untuk menjamin keberlangsungan proses pembelajaran dan menghindari ketergantungan hanya pada satu sumber pendanaan (E. Mulyasa 2011a).

### d. Penggunaan dan Pemanfaatan Dana

Pada tahap ini, dana yang diperoleh dialokasikan dan dimanfaatkan secara tepat guna, menyasar program-program prioritas seperti pengembangan kurikulum, peningkatan kualitas guru, pengadaan sarana prasarana, serta pengembangan peserta didik dalam berbagai aspek. Penggunaan dana pendidikan harus sejalan dengan kebutuhan prioritas pendidikan, bukan hanya operasional rutin, tetapi juga inovasi dan pengembangan mutu (Sagala 2010).

### e. Pengawasan dan Pengendalian Keuangan

Pengawasan keuangan bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan perencanaan, tidak terjadi pemborosan, penyalahgunaan, atau korupsi. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui sistem audit internal, laporan periodik, dan evaluasi kinerja anggaran.

Pengendalian dalam pembiayaan pendidikan berfungsi sebagai alat deteksi dini terhadap penyimpangan serta sarana menjaga akuntabilitas publik (Nasution 2022).

f. Evaluasi dan Pertanggung jawaban

Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana penggunaan dana telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan. Pertanggungjawaban dilakukan dalam bentuk laporan keuangan yang transparan dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Evaluasi pembiayaan penting dilakukan sebagai dasar pengambilan keputusan di masa depan dan sebagai wujud pertanggungjawaban publik (*public accountability*) (Nanang 2000).

### 3. Sumber dan Jenis Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan memegang peran krusial dalam mewujudkan sistem pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Tanpa dukungan dana yang memadai, lembaga pendidikan akan mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum, sumber pembiayaan pendidikan dapat berasal dari berbagai elemen, seperti pemerintah pusat dan daerah, masyarakat (khususnya orang tua peserta didik), lembaga swasta, serta sumber lainnya seperti hibah, bantuan luar negeri, dan kemitraan dengan sektor industri. Di antara berbagai sumber tersebut, pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi penyokong utama dalam pendanaan pendidikan. Dana ini dialokasikan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pembangunan infrastruktur, penyediaan sarana dan prasarana, pembayaran gaji tenaga pendidik, hingga pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan. Selain itu, masyarakat juga turut berkontribusi melalui sumbangan pendidikan yang sifatnya tidak memaksa, sebagai bentuk partisipasi aktif dalam mendukung keberlangsungan proses pendidikan (Nasional 2006). Dengan demikian, sumber pembiayaan sekolah dapat diklasifikasikan ke dalam empat kelompok utama, yaitu:

- a. Dana dari penerimaan umum pemerintah, yang menjadi pilar utama dalam pendanaan pendidikan. Sumber ini mencakup pemasukan negara di semua jenjang pemerintahan, baik dari pajak, bantuan internasional, maupun pinjaman pemerintah. Besarnya dana ditentukan oleh pemerintah pusat atau daerah, dengan memperhatikan prioritas kebijakan yang telah ditetapkan.
- b. Penerimaan khusus untuk sektor pendidikan, meliputi bantuan atau pinjaman luar negeri yang memang ditujukan secara khusus untuk keperluan pendidikan. Contohnya adalah dana dari lembaga seperti UNICEF atau UNESCO, serta pajak khusus yang seluruh atau sebagian hasilnya dialokasikan untuk pendidikan.
- c. Iuran pendidikan atau uang sekolah, yakni kontribusi langsung dari orang tua murid kepada sekolah, yang biasanya didasarkan pada kebijakan tertentu dan kesepakatan bersama.
- d. Sumbangan sukarela, yang mencakup bantuan dari individu, masyarakat, atau pihak lain, baik dalam bentuk uang tunai, barang, jasa, maupun kegiatan penggalangan dana yang bersifat tidak mengikat dan sukarela.

Sekolah swasta juga memperoleh dukungan dari pemerintah dalam bentuk berbagai bantuan. Bentuk bantuan tersebut antara lain berupa penempatan guru negeri yang dipekerjakan di sekolah swasta, bantuan khusus untuk pembangunan gedung dan pengadaan peralatan, serta bantuan rutin guna memenuhi kebutuhan operasional harian. Bantuan ini dapat dikategorikan sebagai sumbangan, bantuan, atau subsidi. Sumbangan biasanya diberikan secara insidental untuk membantu menutupi sebagian kecil dari kebutuhan rutin. Sementara itu, bantuan dapat disalurkan berdasarkan jumlah peserta didik yang terdaftar, dan subsidi diberikan untuk menutupi seluruh pengeluaran rutin sekolah secara menyeluruh (Bafadal 2006).

Terkait jenis pembiayaan pendidikan, Sagala membaginya ke dalam beberapa kategori, yakni pembiayaan rutin, pembiayaan pengembangan, dan pembiayaan tak terduga. Pembiayaan rutin mencakup biaya operasional harian sekolah seperti gaji guru, listrik, air, dan alat tulis. Pembiayaan pengembangan meliputi investasi untuk peningkatan kualitas pendidikan, seperti pelatihan guru, pengembangan kurikulum, dan pembangunan fasilitas belajar. Sementara itu, pembiayaan tak terduga disediakan untuk kebutuhan mendesak atau kejadian luar biasa yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Dalam konteks manajemen pendidikan, keberhasilan pengelolaan sumber dan jenis pembiayaan ini sangat menentukan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, serta pencapaian target mutu yang diinginkan (Sagala 2010).

### B. Konsep Peningkatan dan Pengembangan Peserta Didik

Peningkatan peserta didik merujuk pada usaha sistematis yang dilakukan oleh lembaga pendidikan untuk mendorong kemajuan peserta didik dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, sehingga mereka mampu mencapai kompetensi sesuai dengan tujuan pendidikan. Tujuan dari

peningkatan dan pengembangan peserta didik adalah untuk mengarahkan seluruh potensi individu agar berkembang secara optimal dalam berbagai aspek kehidupan, baik kognitif, afektif, psikomotorik, maupun sosial dan spiritual. Pengembangan ini tidak hanya bertujuan membentuk pribadi yang cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter kuat, memiliki keterampilan hidup yang relevan, dan mampu menghadapi tantangan zaman yang terus berkembang. Pendidikan yang berkualitas harus mampu membina peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, inovatif, serta memiliki kepekaan sosial dan tanggung jawab moral yang tinggi. Dalam hal ini, Syaiful Sagala menegaskan bahwa pengembangan peserta didik merupakan bagian integral dari proses pendidikan yang menekankan pada upaya sistematis dan strategik untuk mengaktualisasikan seluruh potensi peserta didik dalam rangka mencapai mutu pendidikan yang lebih baik (Sagala 2010).

Dalam kerangka pendidikan nasional, pengembangan peserta didik diarahkan untuk mencetak pribadi-pribadi Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak luhur, sehat jasmani dan rohani, berpengetahuan luas, terampil, kreatif, mandiri, serta mampu menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Tujuan mulia ini ditegaskan secara jelas dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang tersebut menekankan pentingnya pengembangan potensi peserta didik secara menyeluruh dan berkelanjutan guna menciptakan generasi unggul yang mampu bersaing di tingkat global (Republik Indonesia 2003).

Selain itu, tujuan peningkatan dan pengembangan peserta didik juga mencakup upaya untuk mempersiapkan mereka menghadapi tantangan zaman yang terus berubah. Oleh karena itu, peserta didik perlu dibekali dengan kemampuan berpikir kritis, keterampilan komunikasi, kemampuan berkolaborasi, dan kreativitas, yang merupakan bagian dari keterampilan abad ke-21. Peningkatan kapasitas peserta didik dalam bidang akademik harus disertai pula dengan pengembangan karakter, minat, bakat, dan keterampilan hidup (*life skills*). Menurut Mulyasa, pengembangan peserta didik tidak hanya berfokus pada aspek pembelajaran formal, tetapi juga melalui berbagai kegiatan non-akademik seperti ekstrakurikuler, pembinaan karakter, serta pelatihan keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan zaman (E. Mulyasa 2011a).

Ruang lingkup pengembangan peserta didik ini tidak terbatas pada aspek akademik semata, melainkan meliputi dimensi kognitif, afektif, psikomotorik, sosial, emosional, moral, spiritual, dan keterampilan hidup. Dalam aspek akademik, pengembangan diarahkan pada peningkatan prestasi belajar dan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Di sisi lain, aspek non-akademik mencakup pengembangan minat dan bakat melalui kegiatan ekstrakurikuler, penguatan karakter, serta pembinaan keterampilan interpersonal dan intrapersonal. Kegiatan ekstrakurikuler ini dinilai sebagai bagian penting dari sistem pendidikan yang berfungsi sebagai pelengkap proses pembelajaran formal. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 62 Tahun 2014, kegiatan ekstrakurikuler diposisikan sebagai sarana strategis dalam pengembangan potensi, minat, dan bakat peserta didik di luar kegiatan intrakurikuler. Peraturan ini menekankan bahwa ekstrakurikuler bukan sekadar aktivitas tambahan, melainkan wadah aktualisasi diri peserta didik secara holistik yang mencakup aspek kecerdasan intelektual, emosional, sosial, serta keterampilan. Melalui berbagai jenis kegiatan ekstrakurikuler baik yang bersifat wajib maupun pilihan peserta didik dapat mengembangkan soft skills seperti kepemimpinan, kerja sama tim, tanggung jawab, serta nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan yang mendukung pembentukan karakter secara utuh. Permendikbud tersebut menjelaskan bahwa pengembangan diri melalui kegiatan ekstrakurikuler merupakan bagian dari layanan pendidikan yang integral dalam rangka pembentukan kepribadian dan penanaman nilai-nilai kehidupan yang tidak bisa dicapai hanya melalui kegiatan intrakurikuler (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2014).

Lebih lanjut, pengembangan peserta didik juga harus mencakup dimensi pembentukan karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kerja sama, dan kepedulian sosial. Zamroni menyatakan bahwa pengembangan peserta didik yang utuh harus mencakup aspek intelektual, sosial, emosional, moral, dan spiritual sebagai satu kesatuan proses pendidikan yang tidak terpisahkan (Zamroni 2011). Nilai-nilai spiritual tersebut dapat ditanamkan melalui pembelajaran kontekstual serta pembiasaan dalam lingkungan sekolah yang positif. Selain itu, aspek spiritual peserta didik pun perlu dikembangkan agar mereka memiliki fondasi moral dan etika yang kuat dalam menjalani kehidupan, sehingga lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab besar untuk merancang program pengembangan peserta didik yang menyentuh seluruh dimensi kehidupan secara terpadu dan berkelanjutan. Dengan demikian, pendidikan yang berorientasi pada peningkatan dan pengembangan peserta didik tidak hanya berfungsi sebagai proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai

sarana untuk membentuk manusia seutuhnya yang memiliki daya saing global serta kesadaran sosial dan moral yang tinggi.

Adapun keberhasilan pengembangan peserta didik dapat diukur melalui berbagai indikator yang mencerminkan pencapaian tujuan pendidikan secara menyeluruh. Secara umum, indikator tersebut meliputi pencapaian prestasi akademik, peningkatan sikap dan karakter positif, serta berkembangnya potensi, minat, dan bakat peserta didik. Dalam konteks kurikulum saat ini, indikator keberhasilan juga mencakup ketercapaian profil pelajar Pancasila, yang menggambarkan siswa yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Selain itu, keterlibatan aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler, lomba, serta proyek sosial juga menjadi tolak ukur penting dalam menilai sejauh mana peserta didik berkembang secara utuh. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam panduan implementasi Kurikulum Merdeka menyebutkan bahwa keberhasilan pengembangan peserta didik tidak hanya dilihat dari aspek kognitif, tetapi juga dari kemampuan sosial-emosional dan karakter yang ditunjukkan dalam keseharian (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset 2021).

### C. Strategi Manajemen Pembiayaan yang Efektif untuk Mendukung Program Peningkatan dan Pengembangan Peserta Didik.

Manajemen pembiayaan memegang peran krusial dalam mendukung keberhasilan proses peningkatan dan pengembangan peserta didik. Tanpa perencanaan dan pengelolaan pembiayaan yang efektif, berbagai program pendidikan yang dirancang untuk menggali dan mengembangkan potensi peserta didik tidak akan dapat terlaksana secara optimal. Pembiayaan yang memadai memungkinkan terlaksananya kegiatan pembelajaran yang berkualitas, pelatihan keterampilan, pengembangan minat dan bakat, penyediaan sarana dan prasarana, serta pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang pembentukan karakter. Menurut Syaiful Sagala, manajemen pembiayaan yang baik mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penggunaan dana secara transparan dan akuntabel agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan efisien dan efektif (Sagala 2010). Pembiayaan yang dikelola dengan baik tidak hanya menjamin ketersediaan dana, tetapi juga menjamin pemerataan akses terhadap layanan pendidikan yang berkualitas, terutama bagi peserta didik yang berasal dari latar belakang ekonomi kurang mampu.

Selain itu, manajemen pembiayaan yang strategis memungkinkan lembaga pendidikan menyusun program pengembangan peserta didik yang berkelanjutan. Dana yang tersedia dapat dialokasikan untuk kegiatan seperti pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, pelatihan guru, serta penyelenggaraan program pembinaan akademik dan non-akademik. Oleh karena itu, penting bagi satuan pendidikan untuk memiliki strategi pembiayaan yang terstruktur serta melibatkan berbagai sumber dana, termasuk dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Keberhasilan pengembangan peserta didik sangat ditentukan oleh seberapa baik lembaga pendidikan mampu mengelola sumber daya keuangan yang dimiliki secara bijak, akurat, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh. Untuk mewujudkan proses pendidikan yang berkualitas, setiap satuan pendidikan harus mampu menyusun dan menerapkan strategi pembiayaan yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi yang sistematis dan terukur.

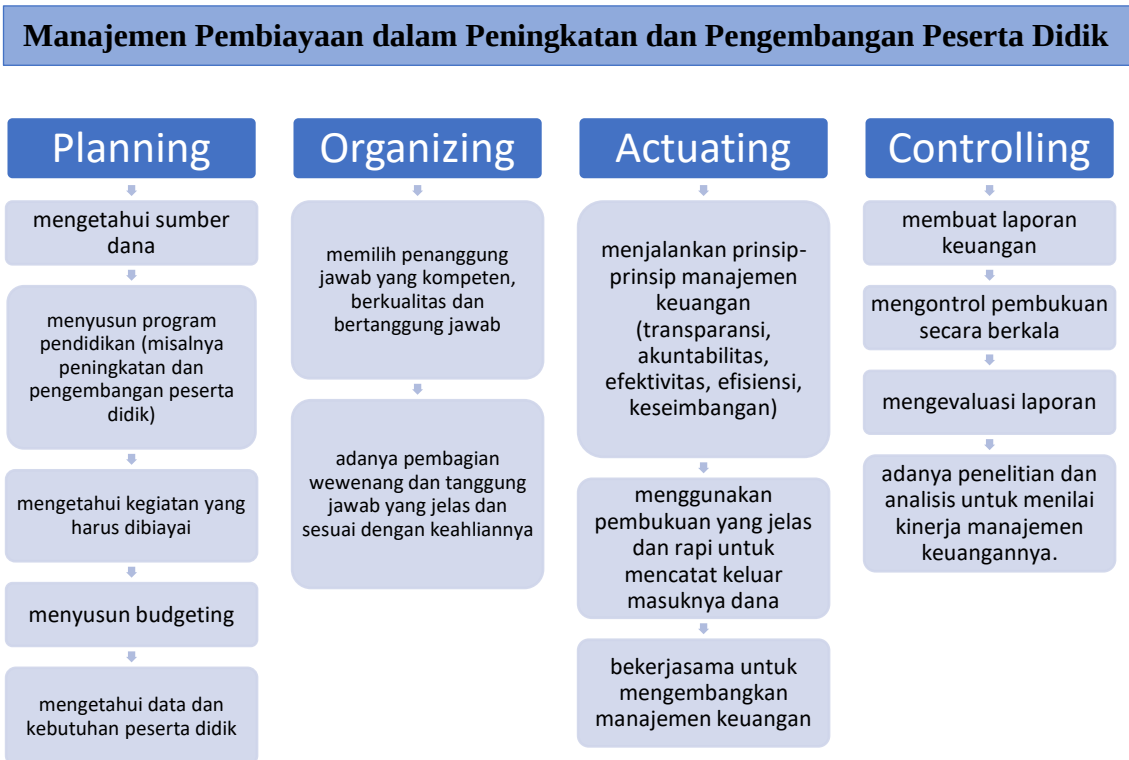
Langkah awal dalam strategi ini adalah menyusun perencanaan anggaran berbasis kebutuhan (*needs-based budgeting*), yaitu merancang atau merencanakan (*planning*) pembiayaan berdasarkan program prioritas yang berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik, baik dalam aspek akademik maupun non-akademik. Perencanaan ini harus disesuaikan dengan visi, misi, dan tujuan lembaga pendidikan serta mempertimbangkan keberlanjutan program (E. Mulyasa 2011a). Selanjutnya, strategi yang tidak kalah penting adalah diversifikasi sumber pembiayaan, yaitu memanfaatkan berbagai sumber dana seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dana Komite, kontribusi masyarakat, hingga kemitraan dengan sektor swasta. Diversifikasi ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber dan meningkatkan fleksibilitas lembaga dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan. Strategi lainnya adalah efisiensi dan efektivitas penggunaan dana, yang menekankan pada prinsip tepat guna dan tepat sasaran, sehingga dana yang dialokasikan benar-benar mendukung capaian hasil belajar dan pengembangan potensi peserta didik.

Dalam proses pengorganisasian (*organizing*), langkah utama yang harus dilakukan adalah memilih pemimpin yang kompeten dan memiliki kemampuan memahami situasi di sekitarnya. Selain itu, penting untuk merekrut sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas serta memiliki loyalitas tinggi dalam menjalankan tugasnya. Setelah struktur terbentuk, seluruh anggota tim dikumpulkan untuk diberikan wewenang dan tanggung jawab sesuai bidang keahlian masing-masing. Khusus untuk posisi keuangan, tidak hanya dibutuhkan keahlian profesional, tetapi juga integritas berupa kejujuran dan sikap amanah, mengingat seringnya terjadi penyalahgunaan dana oleh oknum yang tidak bertanggung jawab (Nasution 2022).

Langkah berikutnya adalah pelaksanaan (*actuating*), yaitu dengan menyusun pembukuan (*accounting*) sebagai alat pencatatan arus masuk dan keluar dana, yang juga berfungsi sebagai dokumen pertanggungjawaban. Seluruh elemen dalam organisasi perlu dipersiapkan agar dapat bekerja sama secara harmonis, memahami prinsip-prinsip dasar manajemen keuangan, menjalankan tugasnya dengan optimal, dan bersinergi dalam proses pengelolaan keuangan. Keterlibatan aktif semua pihak sangat penting untuk memastikan efektivitas pengelolaan dana. Manajemen keuangan bukan sekadar aktivitas pencatatan, tetapi memerlukan strategi pengelolaan yang tepat. Sebesar apa pun dana yang dimiliki sekolah, tanpa pengelolaan yang baik, akan rawan terjadi ketidaksesuaian anggaran, bahkan berpotensi pada praktik penyelewengan, korupsi, dan pemborosan (Nur Komariah 2018).

Di samping itu, penerapan monitoring dan evaluasi (*monev*) atau disebut juga dengan pengawasan (*controlling*) secara berkala terhadap penggunaan anggaran. Dalam konteks ini, Syaiful Sagala menjelaskan bahwa manajemen pembiayaan yang efektif menuntut adanya akuntabilitas, transparansi, dan evaluasi berkelanjutan sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga pendidikan kepada para pemangku kepentingan (Sagala 2010). Pengawasan ini dilakukan untuk menilai apakah dana telah digunakan sesuai dengan rencana dan apakah tujuan program pengembangan peserta didik telah tercapai. Dalam proses pengawasan, langkah awal yang dilakukan adalah menyusun laporan keuangan secara tertulis sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Setelah itu, penting untuk melakukan kontrol pembukuan secara rutin dan konsisten guna memastikan keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran, sehingga dapat mencegah terjadinya kerugian. Selanjutnya, laporan keuangan dievaluasi secara objektif untuk menjamin bahwa strategi manajemen keuangan tetap berjalan secara efektif. Tahap akhir dari proses ini adalah melakukan riset dan analisis mendalam terhadap kinerja manajemen keuangan. Hasil evaluasi tersebut kemudian menjadi pijakan dalam menyusun strategi pembiayaan yang lebih baik pada periode selanjutnya.

Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara konsisten dan profesional, manajemen pembiayaan tidak hanya akan mendukung keberlangsungan program pendidikan, tetapi juga memastikan bahwa setiap peserta didik memperoleh hak yang setara untuk berkembang secara optimal. Berikut ini bagan strategi manajemen pembiayaan dalam meningkatkan dan mengembangkan kualitas peserta didik:



Gambar 1: Bagan Strategi Manajemen Pembiayaan

#### **D. Tantangan Satuan Pendidikan dalam Mengelola Pembiayaan yang Berorientasi pada Pengembangan Peserta Didik.**

Satuan pendidikan menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola pembiayaan yang berorientasi pada pengembangan peserta didik secara menyeluruh. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya keuangan. Banyak sekolah, terutama di daerah terpencil atau yang berada dalam kategori kurang mampu, mengalami keterbatasan anggaran untuk membiayai program-program pengembangan peserta didik secara optimal, termasuk pengadaan sarana dan prasarana, pelatihan guru, serta kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat pembinaan karakter dan bakat. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana pemerintah, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), membuat fleksibilitas anggaran menjadi terbatas dan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan spesifik pengembangan peserta didik (Ahmad 2024).

Tantangan lainnya adalah kurangnya kapasitas manajerial kepala sekolah dan tim pengelola keuangan dalam merancang dan mengimplementasikan strategi pembiayaan yang efektif dan efisien. Banyak satuan pendidikan belum memiliki sistem manajemen berbasis kinerja yang mengintegrasikan antara penganggaran dan pencapaian tujuan pendidikan, sehingga alokasi dana sering kali tidak berorientasi pada outcome, tetapi lebih kepada rutinitas administratif. Dalam jurnal yang ditulis oleh Salmiah, dijelaskan bahwa lemahnya perencanaan berbasis kebutuhan (*needs assessment*) dalam pengelolaan anggaran menyebabkan dana yang tersedia tidak sepenuhnya mendukung program pengembangan potensi peserta didik secara berkelanjutan (Aditya Nugraha, Nurul Khoiriyah Hairani 2023).

Selain itu, tantangan juga muncul dari minimnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung pembiayaan pendidikan. Banyak sekolah belum membangun kemitraan yang strategis dengan pihak eksternal sebagai upaya mendiversifikasi sumber pembiayaan. Hal ini berdampak pada kurangnya dukungan finansial terhadap program inovatif yang dibutuhkan untuk pengembangan minat dan bakat siswa. Di sisi lain, pengawasan dan akuntabilitas juga menjadi masalah tersendiri. Kurangnya transparansi dalam pelaporan penggunaan dana dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari pemangku kepentingan dan berdampak pada kelangsungan program yang telah dirancang.

Dengan demikian, satuan pendidikan harus mampu membangun sistem manajemen pembiayaan yang kuat, profesional, transparan, dan partisipatif agar tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi dan tujuan pengembangan peserta didik dapat tercapai secara optimal.

#### **4. PENUTUP**

Manajemen pembiayaan dalam dunia pendidikan bukan sekadar persoalan administratif dan teknis, tetapi merupakan jantung dari keberlangsungan program peningkatan dan pengembangan peserta didik. Jurnal ini telah menguraikan secara komprehensif bagaimana strategi pembiayaan yang efektif sehingga mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang mendorong lahirnya peserta didik yang unggul secara akademik, kreatif dalam berekspresi, serta tangguh dalam menghadapi tantangan zaman.

Temuan dan uraian yang disajikan menegaskan bahwa pembiayaan yang dikelola dengan baik akan membuka ruang yang lebih luas bagi satuan pendidikan untuk berinovasi dalam menyusun program pengembangan minat, bakat, dan karakter siswa. Tantangan yang ada seperti keterbatasan dana, rendahnya kapasitas manajerial, hingga kurangnya kemitraan dengan masyarakat harus dijawab dengan cara meningkatkan sinergitas antar stakeholder dan komitmen bersama untuk menjadikan setiap rupiah anggaran sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan generasi bangsa.

Melalui studi literatur yang dikaji, jurnal ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas manajemen keuangan di sekolah, diversifikasi sumber pembiayaan, serta optimalisasi pelibatan publik dalam penyusunan dan evaluasi program-program pengembangan peserta didik. Ke depan, pembiayaan pendidikan harus dilihat sebagai alat strategis untuk menciptakan perubahan, bukan hanya untuk membiayai rutinitas.

Dengan demikian, harapannya jurnal ini dapat memberikan kontribusi nyata, baik sebagai referensi akademik maupun sebagai inspirasi praktis bagi para pendidik, pengelola pendidikan, dan pembuat kebijakan untuk terus memperkuat sistem manajemen pembiayaan yang berdampak langsung pada kualitas dan masa depan peserta didik di Indonesia.

#### **5. REFERENSI**

Aditya Nugraha, Nurul Khoiriyah Hairani, dan Rizki Prisila. 2023. "Strategi Pengelola Dana BOS Dalam

- Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas." *PEMA: Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 3 (2): 76–79.
- Ahmad, Rafi Taris Mafazi dan Masduki. 2024. "Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Analisis Konsep Dan Implikasinya Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan)." *Jurnal Pendidikan Indonesia* 5 (6): 238–39. <https://japendi.publikasiindonesia.id/index.php/japendi/article/view/2860>.
- Bafadal, Ibrahim. 2006. *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar: Dari Sentralisasi Menuju Desentralisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- E. Mulyasa. 2011a. *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, Dan Implementasinya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- . 2011b. *Manajemen Dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hadari, Nawawi. 2003. *Administrasi Pendidikan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2021. *Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 Tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar Dan Menengah*. Jakarta: Kemendikbud.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nanang, Fattah. 2000. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasional, Departemen Pendidikan. 2006. *Pedoman Umum Pengelolaan Dana Pendidikan*. Jakarta: Depdiknas.
- Nasution, Adriana Hanny Bella Sukma dan Alifia Maharani. 2022. "Manajemen Keuangan Sekolah Dalam Pemenuhan Sarana Prasarana Pendidikan Di Bekasi." *Al-Fahim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4 (1): 45–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.54396/alfahim.v4i1.226>.
- Nur Komariah. 2018. "Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan." *Jurnal Al-Afkar* 6 (1): 67–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.32520/afkar.v6i1.192>.
- Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Sagala, Syaiful. 2010. *Manajemen Strategik Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Soetjipto & Kosasi. 2004. *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Zamroni. 2011. *Pendidikan Karakter Untuk Membangun Bangsa Yang Bermartabat*. Yogyakarta: LKiS.